

Perubahan Tata Ruang Pesisir Pasca Reklamasi di Pulau Serangan

I Wayan Parwata, I Gede Surya Darmawan, Ni Wayan Nurwarsih

Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Warmadewa, Denpasar.

Abstrak

Pulau Serangan pasca reklamasi mengalami perubahan kuantitas dan kualitas fisik, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya warga serangan. Sejak dilakukan reklamasi tahun 1996, luas Pulau Serangan mencapai empat kali lipat dari luas sebelumnya. Perencanaan awal reklamasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan manfaat sumber daya lahan utamanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah dengan cara membangun fasilitas megawisata seperti tempat rekreasi air, hotel berbintang, marina dan terminal yacht, beachclubhouse, lapangan golf, villa, resort, lagoon dan fasilitas megah lainnya. Sasaran proyek reklamasi tersebut adalah menyelamatkan kondisi fisik Pulau Serangan dari kerusakan lebih parah, peningkatan sosial ekonomi penduduk, pelestarian peninggalan budaya dan peningkatan apresiasi budaya warga Serangan. Akibat kondisi politik dan keuangan investor, pada tahun 1998 proyek reklamasi tersebut terhenti dan baru dapat menyelesaikan 60% dari rencana pengerukan dan reklamasi. Hingga saat ini kegiatan reklamasi belum berjalan sesuai rencana investor dan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan tata ruang pesisir pasca reklamasi Pulau Serangan dan dampak reklamasi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Pulau Serangan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena topik penelitian yang berasal dari fenomena lapangan yang memiliki nilai lokalitas. Hasil penelitian pengembangan dan perubahan kawasan di Pulau Serangan pasca reklamasi memiliki dampak perubahan luas kawasan, jumlah banjar adat dan dinas, mata pencaharian masyarakat, jumlah lembaga desa dan perubahan pemanfaatan ruang publik (adat). Penelitian ini juga memaparkan persentase tingkat perubahan baik fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Kata kunci: Reklamasi, tata ruang, dan perubahan pemanfaatan lahan

The Layout Changes After The Reclamation of Serangan Island

Abstract

After the reclamation project, the Island of Serangan shows changes on the physical quantity and the quality, social environment, economy, and culture of the community. Since the reclamation in 1996, the size of the island gets four times than before. The reclamation was aimed to enhance the natural resource in order to increase the economical standards of the peoples and the government by building megatourism facilities, such as water recreation, star hotels, yacht terminals, beach clubs, villas, lagoons, and other expensive facilities. The object of the reclamation project is to save the physical condition of Serangan Island of serious destruction, enhance the social economy of the people, conserve cultural remains, and enhance the cultural appreciation of Serangan people. Due to political situation and the investors' financial condition, in 1990 the project stopped with 60% of progress from the digging and reclamation plan. Till now the reclamation activity has not run as the investors and the local government planned. The aim of the research is to find out the changes of

the layout of the island sides after the reclamation project of Serangan Island and the impact to the social economy of the people in the island. The method applied in the research is the qualitative descriptive because the topic the research came from field phenomena having local values. The result of the research on the development research and the change of Serangan Island after the reclamation has impacts on the size of the island, the number of the traditional and formal communities, people occupations, village institutions, and public areas. This research also describes the level of the changes physically, socially, economically, and culturally.

Keywords: *Reclamation, layout, changes on land use.*

Pengantar

Perkembangan industri pariwisata memberikan dampak terhadap perubahan dan perkembangan tata ruang di Bali. Berdasarkan hasil survei Parwata (2014), perubahan fungsi lahan di Bali melebihi 1000 Ha/tahun. Angka ini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan terhadap fasilitas hunian dan bangunan fungsi publik. Tingginya harga tanah/lahan di Denpasar salah satu penyebab dilakukannya berbagai jenis pemanfaatan lahan termasuk membuat lahan baru di atas air laut dengan cara reklamasi. Pengembangan lahan ke arah laut melalui reklamasi yang paling terkenal dilakukan di Bali adalah reklamasi Pulau Serangan.

Pulau Serangan pasca reklamasi mengalami perubahan kuantitas dan kualitas fisik, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya warga serangan. Sejak dilakukan reklamasi tahun 1996, luas Pulau Serangan mencapai empat kali lipat dari luas sebelumnya. Perencanaan awal reklamasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan manfaat sumber daya lahan utamanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah dengan cara membangun fasilitas megawisata seperti tempat rekreasi air, hotel berbintang, marina dan terminal *yacht, beachclubhouse*, lapangan golf, villa, resort, lagoon dan fasilitas megah lainnya.

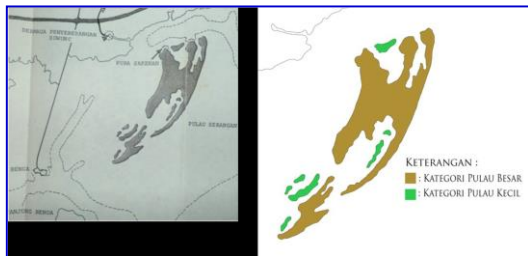
Sasaran proyek reklamasi tersebut adalah menyelamatkan kondisi fisik Pulau Serangan dari kerusakan lebih parah, peningkatan sosial ekonomi penduduk, pelestarian peninggalan budaya dan peningkatan apresiasi budaya

warga Serangan. Akibat kondisi politik dan keuangan investor, pada tahun 1998 proyek reklamasi tersebut terhenti dan baru dapat menyelesaikan 60% dari rencana pengerukan dan reklamasi. Hingga saat ini kegiatan reklamasi belum berjalan sesuai rencana investor dan pemerintah daerah.

Dengan adanya perubahan tata ruang kawasan pesisir di Pulau Serangan, telah mengubah tatanan hidup masyarakat setempat. Perubahan fisik sangat terlihat jelas dengan adanya kanal wisata yang membagi kepemilikan lahan di Pulau Serangan yang justru membuat mengecilnya wilayah kekuasaan dan kepemilikan lahan bagi masyarakat lokal Pulau Serangan. Selain itu, adanya reklamasi perluasan Pulau Serangan ini justru menyebabkan menyempitnya garis pantai yang bisa dinikmati oleh masyarakat Pulau Serangan karena pascareklamasi, hampir 75% garis pantai berada di wilayah kepemilikan PT. BTID (*Bali Turtle Island Development*). Fenomena ini tentunya menimbulkan kontradiksi dengan maksud perencanaan perluasan Pulau Serangan yang diharapkan mensejahterakan masyarakat Pulau Serangan, pada kenyataannya justru mempersempit wilayah kekuasaan masyarakat lokal Pulau Serangan.

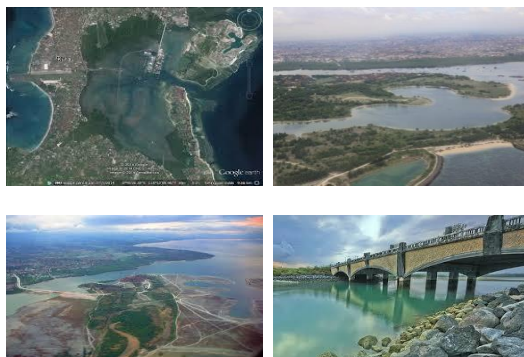
Berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa adanya reklamasi dari PT. BTID telah mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat Pulau Serangan yang ditandai dengan perubahan tata ruang kawasan pesisir Pulau Serangan serta wilayah kekuasaan masyarakat lokal Pulau Serangan dengan wilayah kekuasaan

PT. BTID. Selanjutnya akan dicari tahu dampak perubahan tata ruang kawasan pesisir di Pulau Serangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menilai kecenderungan ke arah positif atau negatif dampak dari perubahan tata ruang kawasan pesisir melalui reklamasi tersebut.



Gambar 1. Pulau Serangan Prareklamasi tahun 1948
Sumber: Kodam IX Udayana, 1988

Sementara Komisaris Utama BTID I Gede Ardika menjelaskan, konsep pembangunan yang akan dilaksanakan di Pulau Serangan adalah pembangunan yang tetap pada konsep tradisional yaitu Tri Hita Karana. Pembangunan akan lebih ditekankan pada pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan melaksanakan berbagai macam pendidikan baik pendidikan umum buat anak-anak, pendidikan tentang kelestarian lingkungan, budaya dan ekonomi kreatif. Sedangkan Direktur Utama BTID, Dea Sudarman, menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan di Serangan antara lain juga untuk menjadikan masyarakat Serangan sebagai mitra kerja, bukan sebagai buruh di daerahnya sendiri.



Gambar 2. Kondisi pulau Serangan Pascareklamasi saat ini. Sumber: bem.feb.ugm.ac.id, 2015

Metode

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif karena topik penelitian yang berasal dari fenomena di lapangan yang memiliki nilai lokalitas. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan observasi langsung ke lapangan untuk melihat fenomena di lapangan dengan instrumen seperti alat tulis dan kamera digital serta melalui survei yaitu melakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh yang dianggap mengetahui dan merasakan secara langsung dampak dari perubahan tata ruang melalui reklamasi ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu mengambil sample yaitu informan yang dianggap relevan dan memiliki informasi paling berguna dan mengetahui cukup banyak mengenai fenomena tersebut (Bungin, 2009).

Hasil, Analisis dan Interpretasi

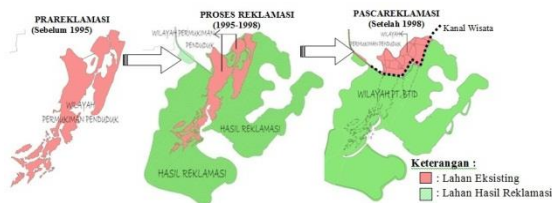
A. Perubahan Tata Ruang PascaReklamasi

Dalam membahas perubahan tata ruang pesisir pasca reklamasi di Pulau Serangan, akan diuraikan dalam dua sub bagian, yaitu: 1) Perubahan tata ruang secara makro/global dan 2) Perubahan tata ruang secara mikro/mendetail.

1. Perubahan Tata Ruang Secara Makrol

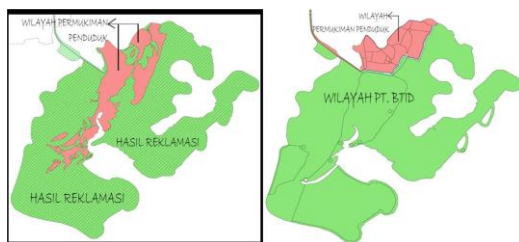
Perubahan tata ruang di Pulau Serangan dengan adanya reklamasi telah merubah fisik Pulau Serangan menjadi empat kali lipat dari luas aslinya. Terdapat jembatan penyeberangan Pulau Bali ke Pulau Serangan pascareklamasi yang berdampak kemudahan transportasi dan informasi dari Pulau Bali menuju Pulau Serangan. Bagian yang paling banyak direklamasi adalah wilayah Pulau Serangan bagian Timur, Selatan, dan Barat sehingga semakin mendekatnya wilayah Barat Daya Pulau Serangan dengan wilayah Tanjung Benoa.

Perubahan Tata Ruang Peisir Pasca Reklamasi di Pulau Serangan



Gambar 3. Rekonstruksi Perubahan Tata Ruang
Sumber: Pengamatan lapangan, 2015

Meskipun luas Pulau Serangan prareklamasi sudah mengalami perluasan melalui reklamasi, tidak membuat wilayah kekuasaan masyarakat terhadap lahan menjadi semakin meluas. Justru membuat semakin menyempit karena pihak PT. BTID membagi wilayah kekuasaan lahan di Pulau Serangan menjadi dua yaitu wilayah Permukiman Penduduk dan wilayah PT. BTID yang dipisahkan oleh kanal wisata selebar 10 meter.



Gambar 4. Wilayah kekuasaan lahan warga semakin menyempit oleh pembagian PT. BTID pascareklamasi
Sumber: Pengamatan lapangan, 2015

Pada prareklamasi, seluruh lahan di Pulau Serangan dikuasai oleh masyarakat setempat yaitu seluas 111 hektar. Namun pascareklamasi, wilayah permukiman penduduk menyempit menjadi sekitar 46,5 hektar sedangkan wilayah yang dikuasai oleh PT. BTID sekitar 435 hektar. Adanya pembagian wilayah kekuasaan menyebabkan berkurangnya garis pantai yang dikuasai masyarakat setempat. Pada prareklamasi, masyarakat setempat menguasai seluruh garis pantai di pesisir pantai Pulau Serangan yaitu sepanjang 13,5 kilometer. Namun pada pasca reklamasi, wilayah garis pantai yang dikuasai/dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat hanya sekitar 2,5 kilometer dari total panjang garis pantai pasca-reklamasi Pulau Serangan sekitar 20 kilometer.

Artinya sekitar 17,5 kilometer garis pantai atau 3/4 dari total panjang garis pantai dikuasai oleh pihak yang melakukan reklamasi yaitu PT. BTID.

2. Perubahan Tata Ruang Secara Mikro

Perubahan tata ruang pra dan pascareklamasi di Pulau Serangan pada wilayah permukiman penduduk dan wilayah PT. BTID, terdiri dari dua jenis yaitu perubahan laut menjadi suatu fungsi baru pada lahan dan perubahan laut menjadi suatu fungsi lama pada lahan.

a. Wilayah Permukiman Penduduk

Pada wilayah permukiman penduduk, terdapat dua jenis perubahan pemanfaatan yaitu :

- Perubahan laut menjadi suatu fungsi baru pada lahan (perubahan laut menjadi taman kota, pasar, LPD, KUD, konservasi penyu dan watersport).
- Perubahan laut menjadi suatu fungsi lama pada lahan (perubahan laut menjadi perluasan Pura Sakenan, Pura Puseh/Dalem Cemara, Pura Segara, Pura Dalem Khayangan dan kuburan).

b. Wilayah PT. BTID

Pada wilayah PT. BTID, terdapat tiga jenis perubahan pemanfaatan yaitu :

- Pemanfaatan daratan menjadi daratan namun terjadi perubahan fungsi pada lahan (perubahan Banjar Kubu dan permukiman warganya menjadi daratan kosong milik PT. BTID).
- Perubahan laut menjadi suatu fungsi baru pada lahan (perubahan laut menjadi Pura Beji Dalem Sakenan, Pura Batu Api dan Pura Batu Kerep).
- Perubahan laut menjadi suatu fungsi lama pada lahan (perubahan laut menjadi perluasan Pura Tanjung Sari, Pura Puncaking Tingkih, Pura Taman Sari dan Pura Tirta Arum).

B. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat

Perubahan tata ruang kawasan pesisir pasca reklamasi telah memberikan berbagai dampak tidak hanya dampak lingkungan, namun memberikan dampak sosial dan ekonomi. Dam-

pak tersebut tidak hanya berupa dampak negatif, namun terdapat pula beberapa dampak positif. Dampak perubahan tata ruang kawasan pesisir tersebut antara lain :

1. Keberlanjutan Ekonomi

Dampak perubahan tata ruang bagi kehidupan ekonomi masyarakat Pulau Serangan telah menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak negatif dalam keberlanjutan ekonomi adalah:

- a. Kehilangan mata pencaharian bagi kelompok penambang

Adanya perubahan lahan laut menjadi daratan yaitu pendirian jembatan penyeberangan Pulau Bali dan Pulau Serangan menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi kelompok nelayan yang mengantarkan orang-orang yang hendak ke Pulau Serangan dari Pulau Bali baik untuk berwisata maupun untuk tangkil ke Pura Sakenan dengan mengendarai jukung. Meskipun berdampak negatif bagi perekonomian kelompok penambang, Desa Pakraman Serangan mengarahkan dan memberikan mandat kepada kelompok penambang untuk menarik karcis masuk bagi orang-orang yang datang ke Pulau Serangan yang ditempatkan setelah jembatan penyeberangan. Adapun nantinya, hasil dari karcis masuk tersebut akan dibagi dua yaitu 50% untuk Desa Pakraman Serangan dan 50% untuk kelompok penambang. Dengan adanya kebijakan ini, sedikit meringankan beban ekonomi keluarga para bekas penambang.

Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat akibat perubahan tata ruang Pulau Serangan yaitu:

- a. Didirikannya warung ikan bakar di sekitar Pura Sakenan;
- b. Kondisi rumah warga yang lebih baik dibandingkan prareklamasi;
- c. Munculnya Beragam Alternatif Mata Pencaharian (tidak hanya sebagai nelayan);
- d. Lahan-lahan baru hasil reklamasi yang letaknya strategis dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat dan desa pakraman Serangan.

2. Keberlanjutan Sosial

Perubahan tata ruang berdampak negatif dan positif terhadap keberlanjutan sosial budaya di Pulau Serangan. Adapun dampak negatif tersebut antara lain :

- a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- b. Isolasi Masyarakat dengan adanya 2 zona kepemilikan lahan yang dibatasi kanal wisata.

Sedangkan dampak positif perubahan tata ruang pascareklamasi terhadap keberlanjutan sosial budaya di Pulau Serangan antara lain:

- a. Kemudahan akses ke kuburan, namun ritualisasi membawa mayat menyeberangi laut hilang;
- b. Aktivitas pasar, LPD, dan KUD yang lebih kondusif;
- c. Adanya balai konservasi penyu dengan berbagai fungsi lainnya.

Menurut lurah Serangan, I Wayan Karma (2015), menyatakan warganya belum mendapatkan bantuan sesuai dengan janji dari PT. BTID. Hampir 20 tahun masyarakat dan warga Serangan menunggu janji kompensasi antara lain: pemanfaatan ruang, sosial, ekonomi, dan adat sesuai perjanjian dengan investor reklamasi, PT. Bali Turtle Island Development (BTID). Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian (Wisnawa,, 2002) menyatakan bahwa peran investor sangat besar terhadap keberlangsungan tata ruang fisik kawasan, sosial ekonomi masyarakat bahkan berpengaruh langsung terhadap budaya dan adat wilayah setempat.

Kesimpulan

Perubahan tata ruang yang terjadi di Pulau Serangan akibat reklamasi tahun 1995-1998 terbagi menjadi dua fase waktu yaitu prareklamasi yaitu sebelum tahun 1995 dan pascareklamasi yaitu setelah tahun 1998. Perubahan tata ruang tersebut terjadi secara makro/global dan mikro/terperinci. Secara makro, perubahan lahan terjadi karena reklamasi PT. BTID dengan mengubah luas Pulau Serangan menjadi empat kali lipat luas aslinya (dari 111 hektar menjadi 481 hektar) dan menyatukan gugusan pulau pra reklamasi menjadi satu pulau tanpa adanya pemisah laut diantara pulau.

Perubahan tata ruang secara mikro terbagi menjadi tiga yaitu: perubahan alih fungsi daratan (perubahan Banjar Kubu dan permukiman warganya menjadi daratan kosong milik PT. BTID), perubahan laut menjadi suatu fungsi baru pada lahan (perubahan laut menjadi taman kota, pasar, LPD, KUD, konservasi penyu, *watersport*, Pura Batu Api dan Pura Batu Kerep), dan perubahan laut menjadi suatu fungsi lama pada lahan (perubahan laut menjadi perluasan Pura Sakenan, Pura Puseh/Dalem Cemara, Pura Segara, Pura Khayangan, Pura Tanjung Sari, dan Pura Puncaking Tingkih).

Dampak perubahan tata ruang melalui reklamasi Pulau Serangan dari aspek ekonomi terdiri dari dampak negatif yaitu kehilangan mata pencaharian bagi kelompok penambang dan dampak positif yaitu : didirikannya warung ikan bakar disekitar Pura Sakenan, kondisi rumah warga yang semakin baik, munculnya berbagai alternatif mata pencaharian (tidak hanya sebagai nelayan), dan munculnya lahan-lahan baru hasil reklamasi yang memiliki nilai ekonomis. Dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat setempat yaitu pelanggaran hak asasi manusia, dan isolasi masyarakat dengan adanya 2 zona kepemilikan lahan yang dibatasi kanal wisata.

Dampak positifnya adalah kemudahan akses ke kuburan namun ritualisasi membawa mayat menyeberangi laut hilang, aktivitas Pasar, LPD, KUD yang lebih kondusif, dan adanya balai konservasi penyu dengan berbagai fungsi lainnya.

Dampak dari reklamasi pulau Serangan berimplikasi terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa yakni antara lain:

1. Ketakutan warga dari aspek fisik: 1) warga sekitar merasa fungsi kawasan yang direklamasi tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana; 2) terjadi pemanfaatan ruang yang selalu menguntungkan kepentingan pihak investor, penguasa dan beberapa kelompok saja; 3) terjadi penelantaran fisik ruang, filosofis tata ruang, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan.
2. Kekhawatiran warga dari aspek sosial budaya, antara lain: 1) inkonsistensi implementasi kaidah-kaidah konsep Tri Hita

Karena dalam pelaksanaan di lapangan; 2) kawasan gugusan pulau reklamasi termasuk di desa adat / pakraman mana?; dan 3) menjaga adat dan budaya Bali agar dapat bertahan dan berkelanjutan.

3. Dari aspek lingkungan, kekhawatiran masyarakat adalah menjaga plasma nuftah dan keberlangsungan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan di sekitar kawasan yang direklamasi serta pengaturan zonasi kawasan berdasarkan lingkungan budaya Bali.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darmawan, Surya IGede (2013), *Pemanfaatan Lahan Pra dan Pasca Reklamasi di Pulau Serangan*, Tesis Program Studi Teknik Arsitektur, Program Pascasarjana, Universitas Udayana: Denpasar.
- Kodam IX Udayana. 1987. *"Pelestarian dan Pengembangan Lingkungan Fisik dan Budaya Pulau Serangan"*. Denpasar: PT. Bina Cipta AdiBuana.
- Serangan, Kelurahan. 2011. *"Profil Kelurahan Serangan Tahun 2011"*. Denpasar: Desa Dinas Kelurahan Serangan.
- Wisnawa, I Made. 2002. *"Model Pemanfaatan Pulau Serangan di Kota Denpasar Pasca Reklamasi"*. Tesis Program Magister Perencanaan Kota dan Wilayah. Semarang: Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.